

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Anshori, Abdul Ghofur, 2013. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm 89.
- Berry, David, 1995. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cetakan ke-3. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010. *Perbuatan melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98-100.
- Gunanegara, 2008, *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Tata Nusa, Jakarta, hlm 2.
- Harsono, Boedi, 1991. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cetakan Kesepuluh, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.
- Haryono, Waty Suwarty, 2011. *Hukum Lingkungan*, Universitas Islam Jakarta.
- Horton, Paul B., dan Hunt, Chester L., 1993. *Sosiologi*, Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari, Penerbit: Erlangga, Jakarta.
- Hs, Salim, 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hutagalung, Arie S. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, LPHI, Jakarta.
- Indonesia Legal Center Publishing, 2008. *Himpunan Peraturan Perundangan Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta.
- Noer, Deliar, 1997. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Pustaka Mizan, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Popper, Karl R. 2002. *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Salindeho, John, 1988. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 40.
- Sarjita. 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah* (Keppres No. 34 Tahun 2003). Tugu Jogja. Yogyakarta. Hlm 43.
- Sawono, 2002. *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Setiawan R., 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat, 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Elit Pribumi Bengkulu*, Balai Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grapindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Grafindo Media Pratama, Jakarta.
- Sudjarwo Marsoem, Wahyono Adi, Pieter G. Manopo, *Ganti Untung Pengadaan Tanah, Memetakan Solusi Strategis Pengembangan Infrastruktur Di Indonesia*, Jakarta, Penerbit ReneBook, 2015, hlm 20.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Syah, Mudakir Iskandar, 2007. *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015. *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-3. Balai Pustaka, Jakarta.
- W.A Gerungan, 1998. *Psikologi Sosial*, PT Eresso, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya**

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.

### **Jurnal dan Artikel**

Haryanto, A. 2014. Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.4 No.2. Hlm 17-27.

Hasan, Djunaendah, *Makalah Aspek Hukum Ekonomi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan*. Jakarta, 14 September 2006, hlm 1. Artikel diakses pada tanggal 27 Maret 2022.

Hibatullah, Thareq Akmal. “*Ini Hak-Hak atas Tanah yang Ada di Indonesia*” <https://smartlegalnetwork.com/2018/09/ini-hak-hak-atas-tanah-yang-ada-di-indonesia/>. Artikel diakses pada tanggal 27 Maret 2022.

Masturi, Rahmad, “Hakekat Keadilan Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, *Jurnal Election Law Review*. Vol. 20, No. 2, (2 November 2018). Hlm 94-107.

Pandit, I Gede Suranaya, 2016. Konsep Keadilan dalam Presepsi Bioetika Administrasi Publik, *Jurnal Public Inspiration*. Vol 1, No.1. Hlm 14-20.

Tjoanda. M, Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Vol. 16, No.4, *Jurnal Sasi*. Hlm 43-50.

### **Penelitian Ilmiah**

Harsono, Boedi, 2004. “Masalah Kerangka Persoalan dan Pokok-pokok Kebijakan Pertanahan”, dalam BF Sihombing, “Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah dan Swasta” (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Tanah di Provinsi DKI). Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta.